



RENCANA KERJA

ΚΑΡΑΠΕΨΟΝ

ΒΑΜΒΑΝΓΛΙΡΟΥ

TAHUN 2026





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan agar selaras dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah, diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk menjadi landasan operasional;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman perencanaan pembangunan tahunan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu diatur Rencana kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah Tahun 2026;
 - b. prioritas pembangunan Daerah Tahun 2026; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Daerah Tahun 2026.

- (3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman penyusunan:
- Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
 - KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2026.

Pasal 3

- (4) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika:
- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH |
| BAB VI | : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| BAB VII | : PENUTUP |
- (5) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 34

BAB I.

PENDAHULUAN

87.1 Latar Belakang

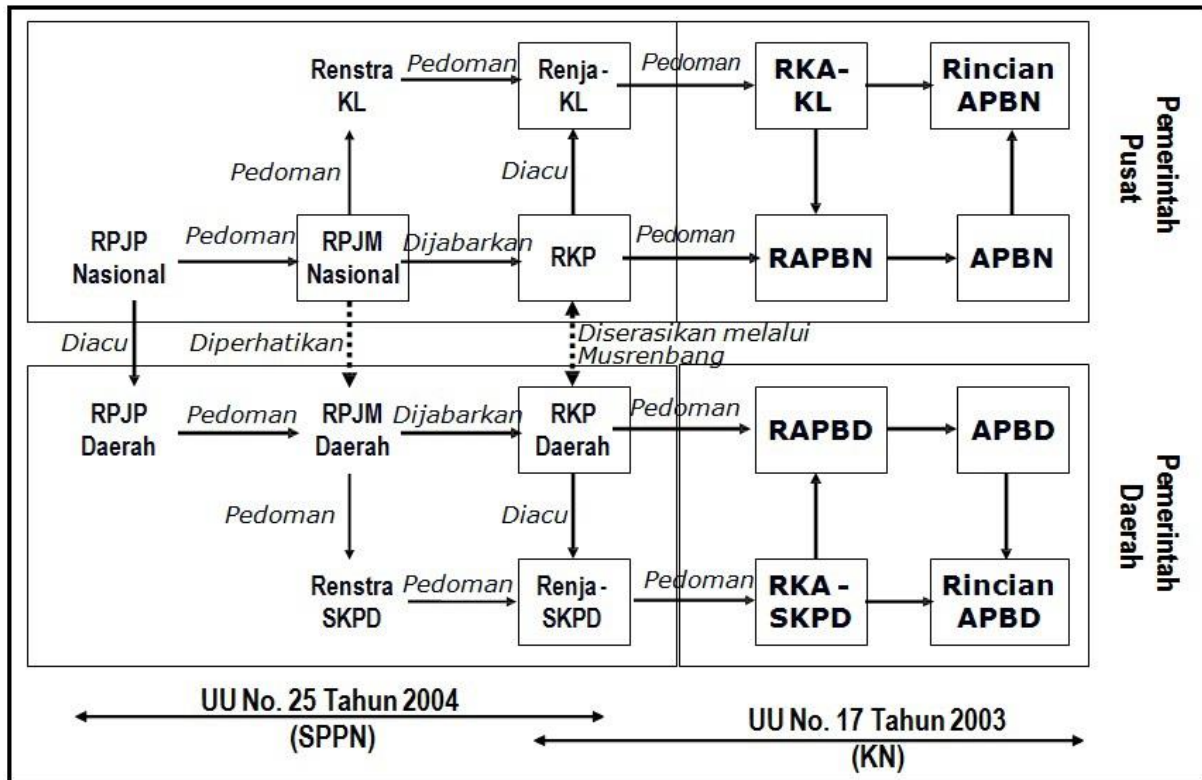
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Bambanglipuro. Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kapanewon Bantul Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026 disusun dengan berpedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

87.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
- m. Peratuan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

87.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

87.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

88.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024,
2. evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Bambanglipuro

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						5		6		7		7a		7b		8		9		10		11		12=11		X = 12/7b x 100%		13 = 6 + 12			14 = 13/5x100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANGAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	-	100	113.750.000	100	100.000		100.000	100	100.000	0	0	0	0	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100	200	213.750.000	200		
		2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi	Persen	100	-	100	113.750.000	100	100.000		100.000	100	100.000	0	0	0	0	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100	200	213.750.000	200				
		2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1		2	113.750.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	0	0	0	0	100	100.000	1	100.000	1	100.000	100	100	3	213.750.000	300				

	4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persentase	100	309.460.000	78.370.000	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	0	0	33	3.829.000	66,7	26.697.500	100	40.000.000	100	40.000.000	100	100	200	118.370.000	200	38		
	4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persentase	100	309.460.000	78.370.000	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	0	0	33	3.829.000	66,7	26.697.500	100	40.000.000	100	40.000.000	100	100	200	118.370.000	200	38		
	4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	4	309.460.000	78.370.000												0	-			2	78.370.000	50	25				
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	Dokumen	4		-												0	-			4	-	100					
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	Dokumen				3	40.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000	0	0	1	3.829.000	2	26.697.500	3	40.000.000	3	40.000.000	100	100	3	40.000.000			
	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	16.148.500.940	80,97	5.585.902.631	82	3.103.526.147	82	3.294.602.372	82	3.219.602.372	82,13	653.844.854	82,13	1.209.956.862	82,13	2.227.857.213	82,2	2.858.231.269	82,2	2.858.231.269	100	89	162,97	8.444.133.900	194	52

		7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	76.400.000	100	3.425.000	100	2.575.000	100	2.575.000	41,7	662.500	58,5	709.250	91,6	1.418.500	100	2.575.000	100	2.575.000	100	100	100	200	6.000.000	200	8
		7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	28	38.900.000	12	1.750.000	7	1.325.000	7	1.325.000	3	662.500	4	662.500	7	1.325.000	7	1.325.000	7	1.325.000	7	100	100	19	3.075.000	68	8
		7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	20	37.500.000	11	1.675.000	5	1.250.000	5	1.250.000	2		3	46.750	4	93.500	5	1.250.000	5	1.250.000	5	100	100	16	2.925.000	80	8
		7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadmi strasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	12.368.912.803	100	4.567.283.594	100	2.710.418.104	100	2.901.494.329	53	537.712.113	60,6	1.034.984.822	90,7	1.919.033.515	100	2.442.396.515	100	2.442.396.515	100	100	87	200	7.009.680.109	200	57
		7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	95	12.099.853.440	33	4.482.463.594	19	2.665.608.104	19	2.856.684.329	19	526.922.113	19	1.017.234.822	19	1.885.363.515	19	2.397.586.515	19	2.397.586.515	100	87	52	6.880.050.109	55	57	
		7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	65	263.859.363	108	83.520.000	13	43.510.000	13	43.510.000	4	10.790.000	6	17.750.000	10	32.370.000	13	43510000	13	43.510.000	100	100	121	127.030.000	186	48	
		7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/tri wulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Semesteran SKPD	Laporan	88	5.200.000	19	1.300.000	22	1.300.000	22	1.300.000	6		8	0	20	1.300.000	22	1.300.000	22	1.300.000	100	100	41	2.600.000	47	50	

		7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	3.400.000	100	850.000	100	3.400.000	100	3.400.000	25		25	0	100	3.400.000	100	3.400.000	100	3.400.000	100	100	200	4.250.000	200	125	
		7.1.1.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	16	3.400.000	4	850.000	4	3.400.000	4	3.400.000	1		1	0	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	100	100	8	4.250.000	50	125	
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.684.079.626	100	371.627.870	100	124.608.639	100	124.608.639	42	45.362.180	56.775	62.787.455		106.499.415	100	156.608.610	100	156.608.610	100	100	200	528.236.480	200	31	
		7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	40	111.443.800	14	15.585.970	10	7.533.310	10	7.533.310	3	1.908.180	6	3.890.255	9	5.652.015	10	7.533.310	10	7.533.310	100	100	24	23.119.280	60	21	
		7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	242.650.000	24	64.407.835	4	45.688.800	4	45.688.800	1	26.508.800	3	31.501.800	3	49.391.800	4	55.488.800	4	55.488.800	100	100	28	119.896.635	175	49	
		7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	174.550.000	19	23.430.000	15	9.090.000	15	9.090.000	4	3.357.500	8	5.195.000		7.382.500	15	9.090.000	15	9.090.000	100	100	34	32.520.000	227	19	
		7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	16	143.246.178	8	19.066.005	4	10.396.529	4	10.396.529	1	2.612.700	2	5.225.400	3	7.838.100	4	10.411.500	4	10.411.500	100	100	12	29.477.505	75	21	

	7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	65.000.000	3	13.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	1	3.000.000	1	750.000	1	1.250.000	1	2.250.000	1	3.000.000	1	3.000.000	10	10	4	16.000.000	50	25
	7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	412	861.067.973	158	224.988.060	20	25.500.000	20	25.500.000	24	62.685.000	5	6.375.000	9	10.625.000	18	26.435.000	24	62.685.000	24	62.685.000	10	10	18	287.673.060	44	33
	7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	28	70.521.675	8	7.750.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	5	3.000.000	5	3.400.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	10	10	15	12.750.000	54	18
	7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	16	15.600.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	4	3.400.000	1	850.000	2	1.700.000	3	2.550.000	4	3.400.000	4	3.400.000	10	10	8	6.800.000	50	44
	7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	145.373.400	100	13.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	10	13.010.000	10	9
	7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	145.373.400	9	13.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	9	13.010.000	22	9
	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	856.382.400	100	265.017.592	100	163.418.104	100	163.418.104	100	156.218.104	25	40.726.461	60	68.763.635	85	120.807.983	100	156.059.744	100	156.059.744	10	10	20	421.077.336	20	49

		7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	219.400.000	24	35.525.000	12	30.000.000	12	30.000.000	3	7.327.500	5	12.342.500	9	22.372.500	12	29.951.000	12	29.951.000	100	100	36	65.476.000	75	30
		7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	16	131.000.000	12	31.799.150	4	15.925.000	4	15.925.000	1	5.935.000	3	10.575.000	4	15.925.000	4	15.925.000	4	15.925.000	100	100	16	47.724.150	100	36
		7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	505.982.400	16	197.693.442	4	117.493.104	4	117.493.104	4	27.463.961	4	45.846.135	4	82.510.483	4	110.183.744	4	110.183.744	100	100	20	307.877.186	125	61
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	95	1.013.952.711	100	364.688.575	100	99.106.300	100	99.106.300	30	29.381.600	100	42.711.700	100	76.697.800	100	97.191.400	100	97.191.400	100	98	200	461.879.975	211	46
		7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28	699.724.850	14	256.292.300	7	88.503.000	7	88.503.000	7	18.778.300	7	32.108.400	7	66.094.500	7	86.588.100	7	86.588.100	100	98	21	342.880.400	75	49
		7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	16	314.227.861	8	108.396.275	4	10.603.300	4	10.603.300	4	10.603.300	4	10.603.300	4	10.603.300	4	10.603.300	4	10.603.300	100	100	12	118.999.575	75	38

	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	95	482.437.500	95	72.285.000	95	28.859.900	95	28.859.900	23	6.827.500	50	13.972.500	65	22.342.500	95	28.859.900	95	28.859.900	100	100	190	101.144.900	200	21
	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	100	431.937.500	100	64.995.000	100	22.885.000	100	22.885.000	20	5.827.500	50	11.230.000	80	16.632.500	100	22.885.000	100	22.885.000	100	100	200	87.880.000	200	20
	7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	20	163.500.000	8	16.000.000	4	9.710.000	4	9.710.000	1	2.427.500	2	4.855.000	3	7.282.500	4	9.710.000	4	9.710.000	100	100	12	25.710.000	60	16
	7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	30	268.437.500	16	48.995.000	6	13.175.000	6	13.175.000	1	3.400.000	3	6.375.000	5	9.350.000	6	13.175.000	6	13.175.000	100	100	22	62.170.000	73	23
	7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	95	50.500.000	100	7.290.000	100	5.974.900	100	5.974.900	25	1.000.000	50	2.742.500	50	5.710.000	100	5.974.900	100	5.974.900	100	100	200	13.264.900	211	26
	7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	50.500.000	4	7.290.000	2	5.974.900	2	5.974.900		1.000.000	1	2.742.500	1	5.710.000	2	5.974.900	2	5.974.900	100	100	6	13.264.900	30	26
	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	94	857.886.000	100	259.485.600	92	96.227.500	92	96.227.500	49	42.590.000	735	57.685.000	975	89.477.500	100	94.727.500	100	94.727.500	109	98	200	354.213.100	213	41

		7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Persen	94	529.986.000	100	129.238.000	100	51.567.500	100	51.567.500	100	51.567.500	73	26.950.000	71,5	32.825.000	95	46.317.500	100	51.567.500	100	51.567.500	100	100	100	200	180.805.500	213	34	
		7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	160	159.986.000	42	32.986.000	40	19.125.000	40	19.125.000	40	19.125.000	40	19.125.000	40	19.125.000	40	19.125.000	40	19.125.000	40	19.125.000	100	100	82	52.111.000	51	33		
		7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	92	370.000.000	46	96.252.000	23	32.442.500	23	32.442.500	6	7.825.000	10	13.700.000	20	27.192.500	23	32.442.500	23	32.442.500	100	100	69	128.694.500	75	35				
		7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga masyarakat	Persen	100	327.900.000	100	130.247.600	100	44.660.000	100	44.660.000	25	15.640.000	75	24.860.000	100	43.160.000	100	43.160.000	100	43.160.000	100	97	200	173.407.600	200	53				
		7.13.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	16	327.900.000	11	130.247.600	4	44.660.000	4	44.660.000	2	15.640.000	3	24.860.000	4	43.160.000	4	43.160.000	4	43.160.000	100	97	15	173.407.600	94	53				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	734.307.000	100	184.733.500	100	75.907.500	100	75.907.500	20	2.507.500	40	9.572.500	80	74.239.900	100	80.657.400	100	80.657.400	100	100	200	265.390.900	200	36				

			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	734.307.000	184.733.500	100	75.907.500	100	75.907.500	100	80.907.500	20	2.507.500	40	9.572.500	80	74.239.900	100	80.657.400	100	80.657.400	100	100	200	265.390.900	200	306	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	20	734.307.000	184.733.500	5	75.907.500	5	75.907.500	5	80.907.500	1	2.507.500	2	9.572.500	4	74.239.900	5	80.657.400	5	80.657.400	100	100	14	265.390.900	70	306	
	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	131.000.000	11.467.500	100	5.302.500	100	5.302.500	100	5.302.500	0	-	0	0	100	5.302.500	100	5.302.500	100	5.302.500	100	100	200	16.770.000	200	103		
	7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	131.000.000	11.467.500	100	5.302.500	100	5.302.500	100	5.302.500	0	-	0	0	100	5.302.500	100	5.302.500	100	5.302.500	100	100	200	16.770.000	200	103		

	7.1.5. 2.01.0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Oran g	4 0	131.000 .000	1 0 2	11.467. 500	1 0 0	5.302.5 00	100	5.302.5 00	50	5.302.5 00	0	0	0	0	5 0	5.302.5 00	5 0	5.302.5 00	5 0	5.302.5 00	10 0	10 0	15 2	16.770. 000	38	1 3
JUMALH						18.66 3.591. 440		6.305 .994. 231		3.449 .823. 547		3.640 .899. 772		3.570 .899. 772		705. 769. 854		1.295 .015. 862		2.545 .917. 113		3.207 .778. 569		3.207 .778. 569				9.513. 772.8 00		

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	NIHIL	NIHIL

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder
	Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja	Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder
	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Adanya Kerjasama yang baik dengan Stakeholder

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan, pengelolaan keuangan dan evaluasi kinerja sangat baik
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan Pelaporan sangat baik
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan kebutuhan peralatan rumah tangga secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan secara tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Perencanaan kebutuhan mebel sesuai kebutuhan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan penyediaan materai sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta kerja sama yang baik dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan pendamping Kalurahan
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta kerja sama yang baik dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan pendamping Kalurahan
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan , Kelompok

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Masyarakat, dan Institusi lainnya
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, Kalurahan dan Forkompimkap
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainnya
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainnya
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainnya
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainnya
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainnya
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan dan Institusi lainnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan anggaran kegiatan direncanakan secara matang dengan cara koordinasi dengan Kepala Jawatan dan Kepala Sub Bag. Pengampu kegiatan
2. Penguatan aset Kapanewon, ketersediaan sarana prasarana sebagai fasilitas untuk peningkatan pelayanan secara optimal
3. Pengendalian dan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja secara intensif (setiap bulan).

88.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	IKM Kapanewon	V	95,72	95	96,52	97	-

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	n/a	n/a	3,70	3,80
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	v	v	v	92,74	92,93

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Bambanglipuro dapat memenuhi target yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- ~~a. Adanya ruang pelayanan yang nyaman, adanya banner alur pelayanan, adanya CCTV untk menjamin keamanan~~
- ~~b. Tersedianya sarana prasarana untuk mendukung pelayanan public;~~
- ~~c. Tersedianya akses untuk penyandang disabilitas~~
- ~~d. Ketersediaan jaringan teknologi informasi, kemudahan mengakses layanan yang bisa diperoleh dengan media online ataupun konvensional~~
- e. Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM terkait pelayanan termasuk didalamnya IT yang dipergunakan;
- f. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, termasuk informasi dan berita *update* melalui media sosial yang mudah murah dan dapat dijangkau masyarakat luas
- g. Adanya komitmen untuk “Bangga Melayani, bukan Bangga Dilayani”, dari semua lini Kapanewon Bambanglipuro.

88.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kewilayahan, Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan	Kelemahan
1. Komitmen yang kuat dari aparat Kapanewon Bambanglipuro untuk melaksanakan tugas dengan baik	Masih kurangnya fasilitas sarana prasarana dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan dan keselamatan kerja aparat di Kapanewon
2. Memiliki SDM yang beragam kompetensi , pengalaman dan pendidikan	Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas SDM

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Kemudahan dalam akses informasi , pelayanan baik secara online maupun offline	Masih banyak masyarakat diwilayah Kapanewon yang gagap teknologi, sehingga kurang memanfaatkan fasilitas pelayanan secara online
Wilayah Kapanewon yang landai dengan berbagai macam potensi unggulan yang ada	Mengembangkan serta mempertahankan potensi Kapanewon untuk tetap menjadi potensi unggulan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimisasikan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kegiatan;
2. Peningkatan dan penguatan SDM dengan berdasarkan kepada kinerja dan TIK;
3. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan secara komprehensif kepada Kalurahan dalam Kegiatan utamanya pada Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas sektoral dalam penanggulangan masalah sosial, stunting, kemiskinan, pembangunan dan peran serta masyarakat, serta masalah

keamanan dan ketertiban masyarakat.

88.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kap. Pajangan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100 Persen	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kap. Pajangan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100 Persen	100,000,000	
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan		0	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Capaian pelaksanaan kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100 Persen	100,000,000	
1	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Dokumen	0	Gelar Budaya Jogja		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	100,000,000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATA	Kapanewon Bambanglipuro	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Kapanewon Bambanglipuro	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	35.996.	

	LAKSANAAN		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	85 Persen	116.040.000	KELEMBAGAN DAN KETATA LAKSANAAN		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	83 Persen	000	
II.1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 Persen	66.040.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	100 Persen	35.996.000	
II.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Program dan Kegiatan	2 Dokumen	66,040,000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	2 Dokumen	35.996.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Keistimewaan yang Disusun								
II.2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 Persen	50.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan			
II.2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota			
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	3,879679,775	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	3.420.317.137	
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	35,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	7.752.500	
III.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	17,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	3.277.500	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
III.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Banglipo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	17,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Banglipo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	4.475.000	
III.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Banglipo	Capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	850,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Banglipo	Capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	3.400.000	
III.2.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Banglipo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	850,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Banglipo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	3.400.000	
III.3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Banglipo	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen	2,702,568,317	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Banglipo	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 persen	2.889.349.329	
III.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Banglipo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 ob	2,654,171,775	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Banglipo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 ob	2.843.684.329	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
III.3.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	48,396,642	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	43.510.000	
III.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1,300,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	2.155.000	
III.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum	100 persen	501,539,128	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	201.236.692	
III.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	39,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10 Paket	9.087.290	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Kantor yang Disediakan			
III.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Banglipo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	71,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Banglipo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	56.051.360	
III.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Banglipo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	63,100,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Banglipo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	9.088.660	
III.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Banglipo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	45,081,771	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kapanewon Banglipo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.255.382	
III.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Banglipo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	13,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Banglipo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	1.500.000	
III.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Banglipo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103 laporan	239,234,932	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Banglipo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103 laporan	106.854.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
III.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Banglipo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 dokumen	26,222,425	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Banglipo	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 dokumen	5.000.000	
III.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Banglipo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	4,400,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Banglipo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	3,400,000	
II I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kapanewon Banglipo	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 Persen	127,117,400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kapanewon Banglipo	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-	-	
III.5.1	Pengadaan Mebel	Kapanewon Banglipo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	63,159,400	Pengadaan Mebel	Kapanewon Banglipo	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
III.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Banglipo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	63,958,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Banglipo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	
II I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Banglipo	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan	100 Persen	235,316,480	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kapanewon Banglipo	Capaian kinerja penyediaan jasa	100 Persen	163.131.616	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pemerintah daerah			Pemerintahan Daerah		penunjang urusan pemerintah daerah			
III.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Banglipo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	73,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Banglipo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	29.988.000	
III.6.2	Penyediaan Jasa dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Banglipo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	49,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Banglipo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	15.760.000	
III.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Banglipo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	112,716,480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Banglipo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	117.383.616	
II I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kapanewon Banglipo	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	95 Persen	275,988,450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kapanewon Banglipo	Capaian kinerja pemeliharaan	95 Persen	155.477.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah		barang milik daerah			
III.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Banganglipuro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	166,058,450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Banganglipuro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	119.153.000	
III.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Banganglipuro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	109,930,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Banganglipuro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	4 unit	36.294.000	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Banganglipuro	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	95 Persen	174,500,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Banganglipuro	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	95 Persen	33.174.000	
IV.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Kapanewon Banganglipuro	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 Persen	155,500,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Kapanewon Banganglipuro	Capaian kinerja penyelenggaraan	100 Persen	24.585.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tingkat Kecamatan					di Tingkat Kecamatan		pemerintahan kapanewon			
IV.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	56,500,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	10.050.000	
IV.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	99,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	14.535.000	
IV.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	95 persen	19,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	95 persen	8.589.000	
IV.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	2 laporan	19,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	2 laporan	8.589.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dengan Non Perizinan		pada Urusan Pemerintahan			dengan Non Perizinan		pada Urusan Pemerintahan			
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kapanewon Bambanglipuro	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	94 Persen	255,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kapanewon Bambanglipuro	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	92 Persen	110.268.372	
V. 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	94 Persen	160,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	92 Persen	85.421.000	
V. 1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 lembaga	60,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40 lembaga	22.000.000	
V. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 laporan	100,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 laporan	63.421.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
V.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 Persen	95,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 Persen	24.847.372	
V.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	95,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	24.847.372	
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Bambanglipuro	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100 Persen	270,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Bambanglipuro	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100 Persen	6.000.000	
VI.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	270,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	6.000.000	
VI.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	5 laporan	270,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	5 laporan	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Vertikal di Wilayah Kecamatan			Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Bambanglipuro	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	63,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Bambanglipuro	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	107.615.000	
VII.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	63,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	107.615.000	
VII.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	100 orang	63,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	100 orang	107.615.000	

No	Rancangan Awal RKPD*					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
JUMLAH					4,758,219,775					3.813.370.509	

□ bagian rancangan awal RKPD dapat diambilkan dari Tabel 6 Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

□ bagian hasil analisis kebutuhan diisikan kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan analisis dilakukan

88.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pengerasan bahu jalan	Jalan Ruas Wonodoro-Warungpring (K.559)	Terbangunya bahu jalan	1 paket	POKIR
2	Rehabilitasi Jaringan irigasi	Daerah Irigasi Mejing Jolundo. lokasi di Padukuhan Jomblang (Perbatasan Tulasan	Terehabilitasinya jaringan irigasi	1 paket	POKIR
3	Pengerasan Jalan	Jl Ganjuran - Mulyodadi	Laporan kegiatan	2.64 km	POKIR
4	Reformasi Pelayanan Publik	Kal. Sumbermulyo	Terbentuknya kal. Tangguh bencana	1 paket	POKIR
5	Pengadaan Peralatan penanganan bencana	Kal. Sumbermulyo	Memilik peralatan tanggap bencana	1 paket	POKIR
6	Pembangunan gorong-gorong jalan kabupaten	Jl Panggang - Paker	Laporan pembangunan	paket	POKIR
7	Bangket/talud jalan kabupaten	Jl Plebengan - Dagan - pinggir	Laporan pembangunan	100m	POKIR
8	Penerangan jalan	Jl Panggang - Paker	Laporan pembangunan	4 unit	POKIR

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

89.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan

toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan.	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	

<p>12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.</p> <p>13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.</p> <p>14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya.</p> <p>15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.</p> <p>16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.</p> <p>17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.</p>	<p>7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</p> <p>8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.</p>
---	---

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Infrastruktur Berkelanjutan.
- (2) Reformasi Pelayanan Publik.
- (3) SDM Berbudaya dan Berkualitas.
- (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana.

(5) Pengembangan Sektor Unggulan Berbasis Inovasi dan Hilirisasi.

89.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.

PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.

PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target 2026
					Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bambanglipuro		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,74	92,93

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

1,	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimeaan yang berkualitas	-			100 Persen	35.996.000,00					-		0,00		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	-			100 Persen	35.996.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	-		0,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	4.01.04.5.01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan															
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi				2 Dokumen	35.996.000,00	Kab. Bantul, Bantulipuro, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas			0,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.677.374.509,00								4.515.062.375,00	
	7.01	KECAMATAN						3.677.374.509,00								4.515.062.375,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-			82,3 Angka	3.420.317.137,00								3.752.562.375,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			100 Persen	7.752.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-		35.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	3.277.500,00	Kab. Bantul, Bantulipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			17.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4.475.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		17.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	-		100 Persen	2.889.349.329,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	-	2.703.868.317,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.843.684.329,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas		2.654.171.775,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	43.510.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas		48.396.542,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	2.155.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas		1.300.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	3.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	850.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		850.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			100 Persen	201.236.692,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	-	501.539.128,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9.087.290,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas		39.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	56.051.360,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas		71.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>			15 Paket	9.088.660,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas		63.100.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>			4 Paket	10.255.382,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas		45.081.771,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>			2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas		13.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>			103 Laporan	106.854.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas		239.234.932,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>			7 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas		26.222.425,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			100 Persen	155.447.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	275.988.450,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	119.153.000,00	Kab. Bantul, Bantulipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah		166.058.450,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	36.294.000,00	Kab. Bantul, Bantulipuro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah		109.930.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-			92 Persen	33.174.000,00						-	174.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	-			92 Persen	24.585.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	155.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>			4 Laporan	10.050.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		56.500.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>			6 Dokumen	14.535.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		99.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Capaian kinerja pelayanan kapanewon</i>	-		92 Persen	8.589.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	-	19.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan													
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>			2 Laporan	8.589.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon		19.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat kalurahan</i>	-		92 Persen	110.268.372,00						-	255.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Cakupan pemberdayaan masyarakat kalurahan</i>	-		92 Persen	85.421.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	-	160.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				40 Lembaga Kemasyarakatan	22.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		60.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				23 Laporan	63.421.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		100.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon</i>	-			92 Persen	24.847.372,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-	95.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>				4 Laporan	24.847.372,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		95.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	-			100 Persen	6.000.000,00						-	270.000.000,00	

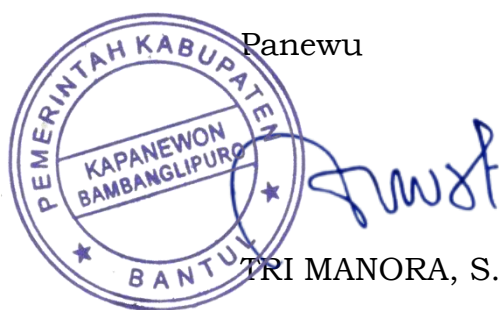
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban kapanewon	-			100 Persen	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	-	270.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	6.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	-	270.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-		100 Persen	107.615.000,00						-	63.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum	-		100 Persen	107.615.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	63.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	107.615.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	63.000.000,00	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
							J U M L A H	3.813.370.509,00						4.515.062.375,00		

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.



TRI MANORA, S.Sos

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197004071990031004